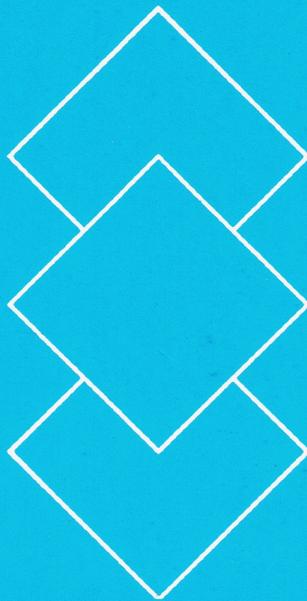


VOLUME12, NOMOR 2, OKTOBER 2010

ISSN 1410-9883

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN



CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting
Kadeni

Wakil Ketua Penyunting
Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana
R. Hendro Prasetyanto
Udin Erawanto
Riki Suliana
Prawoto

Penyunting Ahli
Miranu Triantoro
Masruri
Karyati
Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha
Yunus
Nandir
Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 49 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 10.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 3.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar **Ketua:** Masruri, **Pembantu Ketua I:** Kadeni, **Pembantu Ketua II:** Karyati, **Pembantu Ketua III:** Syaiful Rifa'i.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan****Volume 12, Nomor 2, Oktotober 2010****Daftar Isi**

Perubahan Sikap Berwirausaha Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek <i>Ekkal Santoso</i>	133
'Perspektif Moralitas Bangsa', Sebuah Renungan Pemikiran Menghadapi Fenomena Sosial <i>Miranu Triantoro</i>	142
Peran BDS (Business Development Service) Dalam Pengembangan Sentra Soto Ayam Bok Ijo Tamanan Kota Kediri <i>Mochamad Muchson</i>	150
Improving The Students' Reading Comprehension Ability Through SQ3W Strategy <i>Purwatiningsih</i>	173
The Problem of Genitive Case in English <i>R. Hendro Prasetyanto</i>	184
Peningkatan Profesionalisme Guru <i>Sunarno</i>	195
Model Pembelajaran Open Ended untuk Menunjang Kreativitas dan Berpikir Kreatif Siswa <i>Suryo Widodo</i>	208
Profil Ideal Seorang Guru, Kajian Pendidikan dengan Nilai Akhlak Karimah <i>Usep Supriatna</i>	225
Perbedaan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Antara Metode Konvensional dengan Pembelajaran (PAKEM) Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan di MTs Negeri Ngantru Tulungagung <i>Endang Wahyuni</i>	237
Pengaruh Motivasi dan Kreativitas terhadap Sikap Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Blitar <i>Kadeni</i>	252
Pengaruh Praktek Microteaching Terhadap Nilai Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Tulungagung <i>Sulastri Rini Rindrayani</i>	272
Pengaruh Model Pembelajaran Open Ended terhadap Hasil Belajar Siswa SD pada Pokok Bahasan Pecahan <i>Yuni Katminingsih</i>	292

‘PERSPEKTIF MORALITAS BANGSA’ Sebuah Renungan Pemikiran Menghadapi Fenomena sosial

Miranu Triantoro

Abstrak: Marthen Luther pernah mengemukakan bahwa Kebesaran suatu bangsa tidak dihitung dari Pendapatan Nasional, Benteng yang kuat, pertahanan yang kuat, tetapi **ORANG YANG TERDIDIK; BERADAB DAN BERAKHLAK**. Hal ini menandakan bahwa betapa sentralnya peranan moralitas bangsa dalam menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu kemampuan suatu bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tolok ukur dari keberhasilannya bangsa yang bersangkutan dalam mendidik kader-kader bangsa yang benar-benar memiliki jati diri dalam menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai manusiawi. Demikian pula sebaliknya jika suatu bangsa tidak mampu dan mau menegakkan nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, maka bangsa yang bersangkutan akan tenggelam dalam sebuah kenistaan dan kehancuran”. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki keluhuran akan nilai-nilai yang mengkristal dalam sila-sila Pancasila seharusnya melakukan refleksi atas fenomena social yang berkembang saat sekarang ini sebagai sarana untuk menatap masa depan yang lebih baik dan bermoral”.

Kata kunci: perspektif, moralitas

Pembangunan merupakan “sine qua non”, sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu bangsa untuk menuju kepada cita-cita dan harapan yang didambakan, karena pada hakekatnya pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan kemajuan yang lebih baik, sempurna, berdaya guna dan memiliki nilai tambah bagi subyek pembangunan itu sendiri, yaitu manusia yang hidup di dalamnya.

Miranu Triantoro adalah Dosen dpk pada STKIP PGRI Blitar

Keberadaan manusia merupakan unsur utama dan modal dasar yang perlu dipersiapkan secara dini dan matang, karena manusialah yang merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Manusialah yang mencoba untuk memikirkan, merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan dan mereka pulalah sebenarnya yang menikmati hasil-hasil pembangunan itu.

Mendasarkan diri pada landasan pemikiran di atas, maka setiap bangsa yang mampu berpikir progresif, harus benar-benar berpikir dan memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengembangkan diri pribadi mereka baik dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki perbedaan-perbedaan antara yang satu dengan yang lain baik dari segi fisik maupun segi psikhis yang tentunya memiliki privasi-privasi sendiri yang harus diakui oleh orang lain, akan tetapi disisi yang lain tidak ada di dunia ini manusia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu bagi orang yang mau dan mampu menyadari akan dirinya, harus dapat menempatkan diri mereka pada proporsi yang sebenarnya. Kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada dalam pola hidup dan kehidupan manusia tersebut memerlukan aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing pihak untuk selanjutnya dapat hidup secara damai dan berdampingan, saling memberi dan menerima, serta mau melepaskan sebagian hak yang dimilikinya untuk kepentingan bersama.

Konsepsi-konsepsi pemikiran yang mengarahkan seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut merupakan sebuah ketentuan yang harus dijadikan sebagai pedoman untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan moralitas yang dikehendaki.

MAKNA MORALITAS BANGSA

Membicarakan masalah moralitas bangsa memang tidak terlepas dari fenomena kehidupan sosial yang senantiasa dinamis, senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan sifat masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu setiap warga bangsa yang ada harus benar-benar mampu melakukan introspeksi dan koreksi terhadap semua perilaku yang dilakukannya dengan tetap mendasarkan diri kepada karakteristik dan kepribadian bangsa. Konsep pemikiran ini sejalan dengan makna moral sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wila Huky (dalam Bambang, 1989, 22), yang secara jelas telah mengemukakan bahwa untuk dapat memahami moral ada tiga cara yang dapat

dilakukan, yaitu (1) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya (2) Moral sebagai perangkat idée-idee tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu dan (3) Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

Pandangan tersebut di atas menggambarkan bahwa moralitas tidak hanya dapat dilihat dari tingkah laku yang nampak saja dan ditunjukkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan lingkungannya, akan tetapi dapat dilihat dari idée-idee atau konsep-konsep yang disampaikan oleh seseorang mengenai pola kehidupan tertentu.

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, Franz Magnis Suzeno (2001, 14) mengemukakan bahwa istilah moral selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Artinya jika "moral" dikaitkan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, maka norma moral tersebut dipergunakan untuk mengukur dan mengetahui betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia.

Kenyataan tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia, maka seorang manusia harus terlebih dahulu mampu untuk memahami hakekatnya sebagai manusia.

Dalam pandangan filsafat, hakekat manusia dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut, yaitu (1) sifat kodrat manusia, yakni sebagai makhluk individu dan makhluk social, hal ini mengandung arti bahwa dalam menjalankan kehidupannya tidak ada seorang manusiapun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia yang satu akan senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain dalam rangka mencapai tujuan kehidupannya. Oleh karena itu sifat individualisme yang terlalu mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain tidak ada artinya ataupun sebaliknya sifat yang terlalu mementingkan orang lain (kehidupan social) tanpa memperhatikan kepentingan individu merupakan implementasi dari sifat kodrat manusia yang keliru. Dalam hal ini seseorang harus mampu membuat keseimbangan, keserasian antara sifatnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Seseorang harus dapat berpikir dan menentukan sebuah keputusan, kapan harus lebih mendahulukan kepentingan individu dan kapan harus mendahulukan kepentingan social, dengan tanpa mengesampingkan kepentingan masing-masing. (2) Susunan Kodrat; artinya bahwa secara kodrati manusia tersusun dari unsure jiwa dan raga, sehingga kedua unsur tersebut harus benar-benar diperhatikan dan dibina, untuk mendapatkan pribadi manusia yang utuh. (3) kedudukan kodrat manusia,

yaitu manusia sebagai makhluk pribadi yang mandiri dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai makhluk pribadi yang mandiri, maka manusia memiliki kebebasan untuk merencanakan dan menginginkan sesuatu di dalam menjalani hidup dan kehidupannya, akan tetapi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia harus menyadari bahwa segala apa yang diinginkan belum tentu dapat terkabulkan dan tercapai, karena dibalik segala usaha yang dilakukan oleh manusia masih ada penentu dari segalanya, yaitu Sang Maha Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya.

Kodrat hidup manusia sebagaimana tersebut di atas, hendaknya menjadi gambaran dan pemikiran setiap manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena dengan menyadari akan hakekat kodrat tersebut akan menjadikan manusia lebih arif dan bijaksana dalam bersikap dan bertindak. Inilah yang menjadi salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lain, yang sekaligus juga merupakan keistimewaan dari Ciptaan Tuhan akan manusia, yaitu memiliki kemampuan dan kekuatan akal untuk memahami alam dengan segala isinya. Sebagaimana hal ini telah dikemukakan oleh Hanafi Anwar (1998; 11-12) sebagai berikut:

“Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk (kejadian), diberinya akal, agar dia dapat memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat mendatangkan manfaat dan kerugian, mana yang halal dan mana yang haram. Dilengkapi dengan nafsu, alat untuk mendorong gairah hidup, supaya mempunyai keinginan-keinginan, agar hidupnya meningkat, berprestasi dan maju terus. Akal dan nafsu adalah anugrah Allah yang sangat mahal harganya bila dinilai dengan uang”

Berdasarkan pada kemampuan akal dan daya pikirnya, maka manusia diharapkan dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pola hidup dan kehidupan yang diperlukan untuk menjalin hubungan antara dirinya sebagai makhluk pribadi dengan Tuhan atau Sang Penciptanya, dengan manusia yang lainnya maupun dengan Alam sekitarnya.

Kebijakan-kebijakan dalam tatanan kehidupan yang mengatur tata hubungan antar manusia sebagai individu dengan Tuhan; individu yang lain dan alam sekitar inilah yang dapat disebut dengan moralitas, sehingga apabila kebijakan atau ketentuan tersebut dikaitkan dengan kesatuan wilayah suatu bangsa dapat disebut sebagai moralitas bangsa. Dengan demikian maka moralitas bangsa pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur tata hubungan antar manusia yang berpijak kepada sandaran dasar yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam kehidupan bangsa Indonesia, moralitas

bangsa tidak bisa dilepaspisahkan dari Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai sosio budaya bangsa.

PERSPEKTIF MORALITAS BANGSA

Kebesaran suatu bangsa salah satunya dapat ditentukan oleh moralitas suatu bangsa yang bersangkutan, artinya sejauh mana manusia yang hidup di dalamnya benar-benar mau merefleksikan dan/atau mengimplementasikan berbagai norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsepsi tersebut masih “jauh panggang dari api”, karena berdasarkan kenyataan yang dapat kita lihat melalui berbagai mass media cetak maupun elektronika, yang kita dengar melalui berbagai siaran media maupun media antar pribadi masih banyak tindakan-tindakan yang menyimpang dari moralitas bangsa. Kita melihat berbagai tindak kekerasan di berbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia, mulai dari tawuran antar pelajar, tawuran antar warga yang telah menelan korban baik jiwa maupun material; berbagai tindakan pelecehan seksual, bahkan yang akhir-akhir ini santer dilakukan oleh “public figure”, hingga tindakan aparaturnegara yang melakukan KKN (Korupsi; Kolusi dan Nepotisme) hingga merugikan keuangan Negara yang tidak terhitung jumlahnya, padahal di sisi lain masih banyak penduduk bangsa yang berada dibawah garis kemiskinan dan menderita karenanya, menambah sederetan tindakan yang tidak mengandung nilai moralitas bangsa. Hal ini telah memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar bagi sebagian kita, bahkan mungkin dunia internasional sudahkah bangsa kita (yang dahulu terkenal dengan kesopanan, murah senyum dan berkepribadian baik) menjadi luntur moralitasnya; atautkah sedang “sakit” sehingga tidak bisa berpikir jernih lagi dalam melakukan aktivitas atau tindakan?

Fakta-fakta tersebut menjadi renungan bagi kita untuk mencari jawab atas fenomena-fenomena social yang berkembang yang justru tidak menunjukkan akan eksistensi moralitas bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Untuk itulah agar moralitas bangsa ini ke depan menjadi lebih baik dan tidak malah terpuruk, seluruh pihak seharusnya mulai mengkaji kembali moralitas yang dapat menjadi cerminan dari sila-sila Pancasila yang telah kita jadikan sebagai pedoman dan tuntunan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat Tuhan sebagai “Causa Prima” yang memiliki sifat-sifat Maha Sempurna; Maha Kasih dan sayang, maha bijaksana, dan lain-lainnya. Hal ini seharusnya mengilhami setiap warga bangsa

kita untuk senantiasa membina rasa kasih dan sayang sesama warga, yang berkuasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada seluruh warga, bukan hanya golongan-golongan tertentu yang dapat menimbulkan ketimpangan-ketimpangan social, demikian pula sebaliknya bagi masyarakat hendaknya senantiasa menjalankan perintah-perintah dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sekaligus juga menghindarkan segala larangan-larangan yang telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangann yang berlaku.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna adanya kesesuaian dengan sifat-sifat manusia yang monopluralis terdiri dari jiwa dan raga; bersifat individu dan social, makhluk pribadi yang mandiri dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melihat fenomena keberagaman eksistensi dan sifat manusia inilah maka setiap warga Indonesia hendaknya menyadari bahwa seluruh rangkaian norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat hendaknya menjadi tuntunan dan dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan tindakan-tindakan baik dalam kehidupan religious dalam hubungannya dengan Sang Kholik/Penciptanya maupun dalam hubungannya dengan manusi yang lainnya. Oleh karena itu sifat "Tepo sariro" hendaknya menjadi acuan dalam menjalani hidup, sehingga kita dapat menghagai martabat orang ;lain dengan memberikan perlakuan yang badil dan manusiawi.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan makna bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kenyataan yang harus disadari dan difahami sehingga menjadi sebuah satu kesatuan mutlak yang harus direfleksikan dan dilaksanakn dengan cara saling menjaga privasi masing-masing, menghargai dan menghormatinya. Hendaknya bangsa kita bukan menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk mencari permusuhan, sehingga terjadi bentrokan antar pelajar, antar suku dan agama, akan tetapi menjadikan perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang dapat dijadikan sarana untuk berpikir secara bijak, karena sebenarnya setiap individu senantiasa memiliki keterbatasan-keterbatasan/kekurangan-kekurangan dan orang lain diharapkan mampu melengkapinya menjadi sesuatu yang lebih sempurna.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung makna adanya kesesuaian sifat dan keadaan dengan hakekat rakyat, yaitu keseluruhan warga yang berada dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia, yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban asasi sebagai manifestasi dari hakekat manusia. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa rakyat memang memiliki kedudukan dan atau kedaulatan yang tertinggi dalam tata aturan pemerintahan, akan tetapi tidak

serta merta masing-masing memiliki kebebasan untuk mengatur kepentingan-kepentingan Negara. Negara atau pemerintah yang berhak untuk mengatur dan mengelola atas nama rakyat atau masyarakat, oleh karena itu segala kebijakan yang diambil oleh pejabat Negara atau pemerintahan tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan golongan tertentu, akan tetapi harus mencerminkan kepentingan seluruh rakyat, sehingga mereka akan lebih menaruh simpati dan hormat akan tugas dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepadanya. Namun demikian apabila yang terjadi sebaliknya dimana seorang pejabat negara atau pemerintah menjalankan amanat dengan hanya mementingkan diri dan kelompoknya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral (misalnya melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), maka amanat yang dilimpahkan kepadanya akan menjadi boomerang yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah perlu dilakukan pemikiran yang seksama diseperti hubungan antara warga Negara dengan Negara, mereka adalah mitra sejajar dalam rangka menciptakan kemakmuran bersama, tidak perlu dipersoalkan apakah Negara harus berada di atas warga Negara yang harus mencampuri urusan-urusan yang bersifat asasi setiap warga negaranya atau justru sebaliknya.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan keinginan dan tujuan akhir dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu setiap element masyarakat Indonesia hendaknya senantiasa berusaha untuk saling asah, asih dan asuh untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang memiliki harta kekayaan sedapat mungkin menyisihkan sebagian dari harta tersebut untuk diberikan kepada yang membutuhkan, karena sebenarnya dibalik apa yang dimilikinya tersimpan kewajiban untuk memberikan kepada orang lain. Apabila dapat tercipta kondisi yang saling menghormati dan menghargai antara hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam menjalani hidup dan kehidupan, maka tujuan masyarakat adil makmur, material dan spiritual akan dapat terwujud dengan baik.

Dengan mencermati konsep-konsep dasar sebagaimana tersebut di atas, maka fenomena social yang terjadi pada bangsa Indonesia pada saat ini patut kita jadikan bahan renungan dan kajian, sehingga ke depan, kondisi bangsa kita tidak semakin parah dan tidak menunjukkan moralitas yang diharapkan sebagaimana tuntunan yang tersurat dan tersirat dalam nilai-nilai moral Pancasila.

PENUTUP

Moralitas bangsa Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh seluruh warga Negara Indonesia, oleh karena itu implementasinya harus benar-benar dapat dilakukan oleh semua pihak, baik penyelenggara Negara, pemerintah maupun rakyat yang ada dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Apabila dalam implementasinya menunjukkan adanya “kemunafikan” maka ketimpangan-ketimpangan sosial akan cenderung terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fenomena sosial yang terjadi saat sekarang yang menunjukkan rendahnya moralitas manusia Indonesia (banyaknya kekerasan, pembunuhan; pelecehan sexual, korupsi yang merajalela dan lain sebagainya) merupakan sebuah gambaran yang patut kita renungkan kembali dengan mempersandingkan dengan nilai-nilai moral bangsa. Untuk selanjutnya melakukan introspeksi dan membenahan diri menuju tatanan yang lebih mapan dan bermoral untuk dapat mencapai cita-cita tata kehidupan yang lebih baik dan bermoral berdasarkan nilai-nilai yang telah mengkristal dalam sila-sila Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-hakim, Suparlan dan Si Untari; 2007, **Pendidikan Multikultural**, Strategi Inovatif Pembelajaran dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia, Malang, Penerbit Inka Print.
- Anwar, Hanafi; 1998, **Hikmah Berpikir**; Gresik, Penerbit Putra Pelajar
- Daroso, Bambang, 1989, **Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila**, Semarang, Penerbit Aneka Ilmu.
- Suzeno, Frans Magnis; 2001, **Etika Politik**, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Tama
-